



Peran Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: Studi Kasus Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan

Ida Nurjana Tamba¹, Vinolya Lidevia Br Manik², Rian Simanjuntak³, Halking⁴

^{1,2,3,4} Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Jalan Willem Iskandar, Medan Estate, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

Email : : idanurjana18@gmail.com

Abstrak

Pemerintahan desa merupakan lembaga pemerintahan terdepan yang berperan penting dalam penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengelola potensi lokal berdasarkan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintahan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengidentifikasi program dan kebijakan yang dijalankan, serta mengungkap faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi di Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian menjelaskan bahwa pemerintah desa telah melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes), berbagai aspirasi, kebutuhan, dan keluhan masyarakat disampaikan secara langsung, dengan keterlibatan tokoh agama, tokoh pendidikan, pemuda, dan perwakilan masyarakat lainnya. Keterlibatan ini tidak hanya terjadi pada tahap perencanaan, tetapi juga pada tahap pengawasan pembangunan, sehingga tercipta transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan desa. Pembangunan desa dijalankan sesuai prioritas yang disepakati dalam Musrembangdes dan disesuaikan dengan kapasitas anggaran desa, sementara evaluasi pembangunan masih mengandalkan monitoring dari pihak kecamatan yang kemudian menjadi dasar perbaikan program. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan optimal sebagai lembaga pengawas dalam setiap musyawarah dan pelaksanaan program desa.

Kata Kunci : Pemerintahan Desa, Kesejahteraan Masyarakat

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa merupakan ujung tombak dalam pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki kewenangan untuk mengelola potensi lokal, menyelenggarakan pembangunan, serta memberdayakan masyarakat sesuai kebutuhan dan aspirasi mereka. Dengan demikian, desa bukan sekadar unit administratif, tetapi juga sebagai entitas strategis dalam pemberdayaan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat desa tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga oleh kualitas layanan publik, pemerataan pembangunan, dan

partisipasi aktif warga dalam proses pembangunan. Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator, perencana, dan penggerak pembangunan. Keberhasilan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh kemampuan aparatur desa dalam merancang program pembangunan yang berbasis kebutuhan lokal, memanfaatkan sumber daya desa secara optimal, dan memastikan akses masyarakat terhadap layanan dasar.

Desa Laut Dendang, yang berada di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, merupakan desa dengan karakteristik sosial-ekonomi yang heterogen. Potensi ekonomi desa meliputi perdagangan, pertanian, usaha mikro, dan jasa. Meskipun potensi ini cukup menjanjikan, masyarakat desa masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan infrastruktur, akses pendidikan dan kesehatan yang belum merata, pengangguran, serta kurangnya sarana prasarana publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran aktif pemerintah desa sangat penting dalam mengoptimalkan potensi desa sekaligus memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Selain itu, tantangan era globalisasi dan digitalisasi menuntut pemerintah desa lebih inovatif dan adaptif. Masyarakat desa dituntut mampu bersaing dalam bidang ekonomi kreatif, memanfaatkan teknologi informasi, dan beradaptasi dengan perubahan sosial-ekonomi. Pemerintah desa harus mampu merancang program pembangunan yang tidak hanya bersifat fisik, seperti pembangunan jalan atau fasilitas umum, tetapi juga program pemberdayaan ekonomi dan sosial, termasuk pengembangan BUMDes, pelatihan keterampilan, serta program kesehatan dan pendidikan masyarakat.

Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, merupakan desa yang memiliki potensi ekonomi cukup besar, meliputi perdagangan, pertanian, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Namun, masyarakat desa masih menghadapi beberapa kendala utama, antara lain: Keterbatasan Infrastruktur dan Fasilitas Publik Jalan desa yang belum sepenuhnya memadai, akses air bersih yang terbatas, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan yang belum merata menjadi kendala utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tingkat Pengangguran dan Keterbatasan Peluang Ekonomi. Meskipun potensi ekonomi desa cukup menjanjikan, banyak warga masih menganggur atau bekerja di sektor informal dengan penghasilan rendah. Hal ini menunjukkan perlunya program pemberdayaan ekonomi yang lebih efektif. Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa atau kegiatan pembangunan masih terbatas. Akibatnya, program pembangunan yang dijalankan sering kurang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Tantangan Era Globalisasi dan Digitalisasi Masyarakat desa dituntut mampu bersaing dalam bidang ekonomi kreatif, memanfaatkan teknologi informasi, dan menyesuaikan diri dengan perubahan sosial-ekonomi. Pemerintah desa perlu inovasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program agar masyarakat mampu menghadapi tantangan tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, muncul beberapa pertanyaan penting: sejauh mana pemerintah desa memainkan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, program-program apa saja yang dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut, serta hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembangunan desa.

Penelitian ini menjadi penting karena akan memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menyoroti kendala yang dihadapi. Bagaimana peran pemerintahan Desa Laut Dendang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Program-program apa saja yang dijalankan pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa untuk memperbaiki dan mengoptimalkan program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, sehingga tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara menyeluruh.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif artinya suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Menggumpulkan data dengan melakukan observasi kelapangan, wawancara dan dokumentasi. Lokasi Penelitian Yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini adalah Di Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tabel 1. Peran Pemerintahan Desa Laut Dendang

No	Aspek yang Diteliti	Temuan Penelitian	Dampak terhadap Masyarakat
1	Perencanaan Pembangunan	Musrenbangdes melibatkan unsur masyarakat secara representatif	Aspirasi masyarakat terakomodasi
2	Partisipasi Masyarakat	Masyarakat terlibat dalam pengawasan pembangunan	Transparansi dan akuntabilitas meningkat
3	Evaluasi Pembangunan	Evaluasi dilakukan setelah monitoring kecamatan	Program diperbaiki sesuai masukan
4	Peran BPD	BPD aktif mengawasi kinerja pemerintah desa	Tata kelola desa lebih tertib
5	Pelayanan Administrasi	Layanan administrasi berjalan baik	Urusan masyarakat lebih mudah
6	Infrastruktur Desa	Perbaikan jalan dan fasilitas umum	Mobilitas dan aktivitas warga meningkat
7	Digitalisasi Layanan	Pengembangan administrasi online	Efisiensi pelayanan publik

Sumber: Data Primer Penelitian, 2025

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemerintah Desa Laut Dendang, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Laut Dendang telah melaksanakan perencanaan dan pembangunan desa dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes). Pelibatan masyarakat dilakukan secara representatif melalui tokoh agama, tokoh pendidikan, pemuda, serta unsur masyarakat lainnya, sehingga berbagai aspirasi dan keluhan dapat disampaikan dan dipertimbangkan dalam proses perencanaan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan desa berjalan berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan dalam Musrembangdes. Masyarakat juga turut berperan dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan. Evaluasi program pembangunan dilakukan setelah pihak kecamatan melakukan monitoring serta memberikan masukan kepada pemerintah desa untuk kemudian ditindaklanjuti.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi optimal sebagai pengawas kinerja pemerintah desa dan hadir dalam setiap musyawarah maupun kegiatan pembangunan. Dari sisi pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa telah memberikan dukungan administratif, namun belum mampu memberikan bantuan dalam aspek pendanaan atau ekonomi. Pemerintah desa juga sedang mengembangkan pelayanan administrasi berbasis teknologi online untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan tanpa harus datang langsung ke kantor desa. Secara umum, pembangunan

infrastruktur desa telah memberikan dampak positif bagi kelancaran aktivitas masyarakat, meskipun belum secara langsung meningkatkan pendapatan kecuali pada sektor pertanian yang merasakan manfaat lebih signifikan.

Pemerintah Desa Laut Dendang menunjukkan komitmen pada prinsip bottom-up planning dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam Musrebangdes. Tokoh agama, tokoh pendidikan, pemuda, dan perwakilan masyarakat lainnya diundang untuk menyampaikan aspirasi dan usulan. Melalui mekanisme ini, berbagai kebutuhan dan permasalahan nyata di lapangan dapat diidentifikasi langsung oleh pemerintah desa. Keterlibatan masyarakat ini memperkuat rasa kepemilikan terhadap program pembangunan serta meningkatkan transparansi karena masyarakat mengetahui arah pembangunan yang direncanakan.

Partisipasi masyarakat tidak berhenti pada tahap perencanaan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan proses pembangunan, seperti pembangunan jalan, fasilitas umum, dan sarana desa lainnya. Kehadiran warga dalam mengawasi pembangunan membantu memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai standar, kualitas terjaga, dan penggunaan anggaran tepat sasaran. Hal ini juga meminimalisir potensi penyimpangan anggaran dan memperkuat akuntabilitas pemerintah desa.

Evaluasi pembangunan desa belum dilakukan secara mandiri oleh pemerintah desa, melainkan menunggu monitoring dari pihak kecamatan terlebih dahulu. Setelah pihak kecamatan menyampaikan hasil evaluasi, barulah pemerintah desa melakukan pembenahan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem evaluasi masih bersifat *top-down*, namun tetap membantu desa mengidentifikasi kekurangan dan memperbaiki kinerja pembangunan. Evaluasi ini penting agar program yang dijalankan tetap relevan dan sesuai dengan standar pemerintah daerah.

Pemerintah desa sudah memberikan dukungan administratif kepada masyarakat, terutama dalam hal surat-menyurat dan kebutuhan dokumen resmi. Meski dukungan yang diberikan belum mencakup bantuan ekonomi atau pendanaan usaha, layanan administratif tetap menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Pelayanan administrasi yang baik membantu kelancaran berbagai urusan warga, termasuk usaha kecil, pendidikan, pekerjaan, dan kebutuhan lainnya.

Pembangunan infrastruktur desa seperti perbaikan jalan, fasilitas umum, dan sarana pendukung lainnya telah memberikan dampak positif terhadap kelancaran

aktivitas masyarakat. Infrastruktur yang baik membantu mempercepat mobilitas, mempermudah akses masyarakat ke fasilitas umum, dan meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi maupun sosial. Meski belum secara langsung meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum, pembangunan ini memberikan efek ekonomi tidak langsung, terutama bagi sektor pertanian yang lebih merasakan manfaatnya dalam mendistribusikan hasil pertanian.

Secara keseluruhan, Pemerintah Desa Laut Dendang telah menjalankan berbagai peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun belum memberikan bantuan ekonomi langsung, pemerintah desa telah berkontribusi dalam aspek perencanaan yang partisipatif, pembangunan infrastruktur, pelayanan administrasi, inovasi teknologi, dan pengawasan yang transparan. Upaya-upaya ini menjadi fondasi penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.

Dalam meningkatkan Kesejahteraan masyarakat, Pemerintahan desa laut Dendang Terus berupaya membuat program-program yang dapat membantu masyarakat. Berdasarkan wawancara kami dengan pihak pemerintahan desa ada beberapa program yang selalu di rancangkan oleh pemerintah desa untuk membangun kesejahteraan masyarakat yaitu

Pemerintah Desa rutin melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebelum tahun anggaran berjalan. Program Musrebangdes merupakan program utama Pemerintah Desa Laut Dendang dalam menyusun arah pembangunan desa. Program ini menjadi fondasi seluruh kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan selama satu tahun anggaran Program ini bertujuan Mengumpulkan aspirasi masyarakat, Menentukan prioritas pembangunan, Melibatkan tokoh agama, tokoh pendidikan, pemuda, dan perwakilan masyarakat Program ini memastikan pembangunan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat sehingga hasilnya dapat dirasakan langsung. Dalam Musrebangdes, masyarakat diberi ruang untuk Menyampaikan masalah yang mereka hadapi Mengusulkan program atau kegiatan yang dianggap penting Mengutarakan keluhan tentang kondisi desa (jalan rusak, fasilitas kurang memadai, dll.) Informasi tersebut menjadi masukan penting bagi pemerintah desa untuk memahami kondisi sosial, ekonomi, maupun infrastruktur secara lebih jelas. Tanpa program ini, pemerintah desa berpotensi kehilangan gambaran nyata mengenai kebutuhan masyarakat.

Setelah semua aspirasi terkumpul, pemerintah desa dan masyarakat bersama-sama menganalisis kebutuhan mana yang paling mendesak, Memilih program yang dapat dianggarkan, Menentukan urutan prioritas pembangunan Proses ini dilakukan secara musyawarah sehingga hasil keputusan diterima oleh seluruh peserta, bukan keputusan sepihak pemerintah desa. Keputusan bersama ini penting untuk menghindari ketidakpuasan atau konflik kepentingan. Musrembangdes berfungsi sebagai alat untuk mengarahkan pembangunan berdasarkan Masalah nyata di lapangan, Kondisi sosial ekonomi masyarakat, Prioritas yang disepakati melalui musyawarah. Melalui mekanisme ini, pemerintah desa dapat memastikan bahwa setiap pembangunan, baik fisik maupun nonfisik, benar-benar memberi dampak bagi kesejahteraan warga, bukan pembangunan yang hanya formalitas.

Karena seluruh proses dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat, Musrembangdes membantu, Meningkatkan transparansi pemerintah desa, Membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, Menikkan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa Masyarakat memahami dari mana anggaran berasal, untuk apa digunakan, dan mengapa program tertentu dipilih dan dikerjakan. Melalui Musrembangdes yang partisipatif, beberapa dampak langsung dapat dirasakan masyarakat, Pembangunan sesuai kebutuhan mempermudah aktivitas warga, Keluhan masyarakat cepat direspon, Masyarakat memiliki peran dalam pembangunan, Prioritas pembangunan menjadi lebih tepat sasaran, Masyarakat merasa dihargai dan didengar Semua ini berkontribusi pada meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat desa. Program Musrembangdes di Desa Laut Dendang adalah program kunci yang memastikan pembangunan desa berjalan partisipatif, demokratis, dan tepat sasaran. Program ini memperkuat hubungan pemerintah desa dengan masyarakat, meningkatkan transparansi, serta menjadikan aspirasi masyarakat sebagai dasar utama pembangunan. Dengan mekanisme tersebut, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat melalui pembangunan yang lebih responsif dan sesuai kebutuhan.

Program pembangunan infrastruktur merupakan salah satu upaya utama Pemerintah Desa Laut Dendang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur menjadi fondasi penting bagi kelancaran aktivitas harian warga, menghubungkan berbagai sektor kehidupan, serta menunjang pertumbuhan ekonomi desa. Semua pembangunan infrastruktur di Desa Laut Dendang dilakukan berdasarkan

prioritas yang telah ditetapkan dalam Musrembangdes. Artinya, kegiatan yang dilaksanakan merupakan hasil usulan dan persetujuan masyarakat. Hal ini memastikan bahwa pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan mendesak warga, bukan sekadar proyek rutin tanpa manfaat nyata. Pembangunan dilakukan sesuai anggaran yang tersedia, sehingga desa berupaya mengerjakan program secara bertahap dan berkelanjutan sesuai kemampuan keuangan desa.

Infrastruktur yang baik membawa dampak nyata bagi kehidupan masyarakat, seperti Meningkatkan kelancaran mobilitas warga, Memperpendek waktu tempuh ke fasilitas umum, Membantu masyarakat dalam aktivitas ekonomi, Memudahkan hubungan antarwilayah dalam satu desa Walaupun wawancara menyebutkan bahwa pembangunan infrastruktur belum langsung meningkatkan pendapatan masyarakat, namun dampaknya terlihat pada kelancaran aktivitas dan peningkatan kenyamanan hidup. Menurut hasil wawancara, sektor yang paling merasakan manfaat dari pembangunan infrastruktur adalah sektor pertanian. Dengan adanya jalan yang lebih baik, Pengangkutan hasil panen lebih mudah, Biaya distribusi berkurang, Petani lebih cepat menjangkau pasar, Aktivitas pertanian menjadi lebih efektif Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur secara tidak langsung mendukung peningkatan pendapatan sebagian masyarakat, khususnya petani. Program pembangunan infrastruktur di Desa Laut Dendang merupakan salah satu instrumen terpenting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang berbasis aspirasi masyarakat ini telah mempermudah aktivitas harian, meningkatkan kelancaran mobilitas, mendukung sektor pertanian, dan memperkuat konektivitas sosial serta ekonomi desa. Meskipun dampak ekonominya belum signifikan secara luas, infrastruktur yang baik menjadi fondasi bagi peningkatan kesejahteraan jangka panjang.

Program Digitalisasi Layanan Desa (Administrasi Online) merupakan inisiatif pemerintah desa untuk menghadirkan pelayanan administrasi yang lebih mudah, cepat, dan efisien melalui pemanfaatan teknologi. Melalui program ini, berbagai layanan administrasi seperti pengurusan surat keterangan, permohonan dokumen kependudukan, serta keperluan administrasi desa lainnya dapat dilakukan secara online tanpa harus datang langsung ke kantor desa. Hal ini memberikan kemudahan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan waktu atau jarak. Selain itu, digitalisasi layanan desa mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan

publik. Proses administrasi menjadi lebih tertata, transparan, dan dapat dipantau dengan baik. Aparat desa pun dapat bekerja lebih efektif karena berbagai data dan permohonan tersimpan secara sistematis dalam sistem digital, sehingga meminimalkan risiko kehilangan berkas atau kesalahan pencatatan.

Program ini juga berperan penting dalam mengurangi waktu tunggu masyarakat. Dengan sistem online, warga dapat mengajukan permohonan kapan saja tanpa harus mengantre, serta dapat memperoleh informasi perkembangan permohonan secara real time. Proses verifikasi dan penerbitan dokumen juga dapat dilakukan lebih cepat berkat alur kerja yang terotomatisasi. Secara keseluruhan, program digitalisasi layanan desa menjadi langkah penting dalam modernisasi pemerintahan desa. Melalui penerapan teknologi informasi, desa bergerak menuju pelayanan publik yang lebih modern, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di era digital. Program ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan inovatif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa telah melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes), berbagai aspirasi, kebutuhan, dan keluhan masyarakat disampaikan secara langsung, dengan keterlibatan tokoh agama, tokoh pendidikan, pemuda, dan perwakilan masyarakat lainnya. Keterlibatan ini tidak hanya terjadi pada tahap perencanaan, tetapi juga pada tahap pengawasan pembangunan, sehingga tercipta transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan desa. Pembangunan desa dijalankan sesuai prioritas yang disepakati dalam Musrembangdes dan disesuaikan dengan kapasitas anggaran desa, sementara evaluasi pembangunan masih mengandalkan monitoring dari pihak kecamatan yang kemudian menjadi dasar perbaikan program. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan optimal sebagai lembaga pengawas dalam setiap musyawarah dan pelaksanaan program desa.

Dalam hal pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa telah memberikan dukungan administratif berupa pengurusan dokumen dan surat menyurat, serta merintis layanan administrasi berbasis teknologi online untuk mempermudah masyarakat. Meski

demikian, dukungan ekonomi atau pendanaan langsung kepada masyarakat masih terbatas, sehingga peningkatan kesejahteraan ekonomi warga sebagian besar bersifat non-finansial. Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan berdasarkan aspirasi masyarakat telah memberikan dampak positif terhadap kelancaran mobilitas, aksesibilitas, dan aktivitas sehari-hari masyarakat. Meskipun dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat secara umum masih terbatas, sektor pertanian merasakan manfaat yang lebih nyata, terutama dalam distribusi hasil panen.

Program digitalisasi layanan desa menjadi langkah progresif pemerintah desa dalam menghadirkan pelayanan administrasi yang lebih efisien, cepat, dan modern. Inisiatif ini mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era digital. Secara keseluruhan, Pemerintah Desa Laut Dendang telah berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan partisipatif, pengembangan infrastruktur, pelayanan administrasi, dan inovasi teknologi. Meskipun masih terdapat keterbatasan dalam aspek dukungan ekonomi dan evaluasi berbasis data mandiri, langkah-langkah yang telah dilakukan menjadi fondasi penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

- Ahkam, B. S. (2018). *Peran pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Desa wisata* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Amantha, G. K. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: (Studi pada Pengelolaan Sumber Mata Air Panas Desa Way Urang). *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47(1), 67-79.
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216-224.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). *Statistik Desa Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Chambers, R. (1997). *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. London: Intermediate Technology Publications.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Kementerian Desa PDTT.
- Kurniawan, A. (2021). Inovasi Pemerintahan Desa di Era Digital. *Jurnal Pemerintahan Desa*, 5(2), 45-58.
- Nur, A. A. (2024). Analisis dampak pembangunan infrastruktur terhadap kesejahteraan masyarakat pedesaan di Kabupaten Bulungan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Manajemen*, 3(1), 1-12.

- Paat, E., Singkoh, F., & Sendow, Y. (2017). Peranan kepala desa dalam perencanaan pembangunan di Desa Pontak Kecamatan Ranoyapo. *Jurnal Eksekutif*, 2(2).
- Putra, R. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 12-25.
- Rahman, F. (2019). Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Bandung. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 10(3), 78-90.
- Sari, D. (2018). Hambatan Pembangunan Desa di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial*, 6(1), 33-44.
- Sari, V. K., & Widyawati, D. (2021). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(7).
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. New York: Alfred A. Knopf.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian Manajemen. Pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, tindakan kelas dan evaluasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Suryanto. (2017). *Pemerintahan Desa dan Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sutiyo, & Maharjan, K. L. (2017). Community participation in rural development. In *Decentralization and rural development in Indonesia* (pp. 125-138). Singapore: Springer Singapore.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th ed.). Pearson.
- Wulandari, S. (2020). Pengembangan BUMDes sebagai Strategi Peningkatan Ekonomi Desa. *Jurnal Ekonomi Desa*, 4(2), 55-67.